

# Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Dalam Pasangan Joko Widodo Dan K.H. Ma'ruf Amin Pada Pilpres Tahun 2019

Mohamad Ferhat Iqbal Pasa<sup>a,1</sup>, Marzuki<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

<sup>b</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan partisipasi politik yang dilakukan oleh santri Pesantren Al Luqmaniyyah dalam pilpres tahun 2019; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pesantren Al Luqmaniyyah dalam pelaksanaan pilpres tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah santri Pesantren Al Luqmaniyyah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan analisis data secara induktif. Keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) partisipasi politik santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah cenderung pasif karena santri hanya menggunakan hak politiknya yang terbatas pada pemberian suara; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri di Pesantren Al Luqmaniyyah yaitu: (a) Para santri secara formal tidak mendapatkan pendidikan dan pemahaman politik secara teori baik langsung maupun tidak langsung dari pihak pondok pesantren; (b) Kesadaran politik para santri dalam konteks partisipasi cukup tinggi, namun hanya terbatas pada pemberian suara. Di luar hal itu, para santri tidak melakukan aktivitas lainnya; (c) Kiai memiliki pengaruh yang kuat terhadap para santri. Namun demikian, pengaruh tersebut hanya terbatas pada bidang keagamaan, sedangkan dalam hal politik, kiai hanya memberikan preferensi politik.

## ABSTRACT

This research aims to (1) describe political participation taken by santri of Al Luqmaniyyah pesantren in 2019 presidential election; (2) identify factors that affect political participation of santri at Al Luqmaniyyah pesantren in 2019 presidential election. This research is a qualitative descriptive study with the research subject santris of Al Luqmaniyyah pesantren. Data collection techniques used in this study are interviews and documentation with inductive data analysis. Validity of data used cross check techniques. The results of this study indicate that (1) the political participation of santris at the Al Luqmaniyyah pesantren tends to be passive because santris only use their political rights which are limited to voting; (2) Factors that influence the political participation of santris in Al Luqmaniyyah pesantren include: (a) The santris do not formally get an education and political understanding in theory either directly or indirectly from the pesantren; (b) The political awareness of the santris in the context of participation is quite high, but is only limited to voting. Apart from that, the santris did not do other activities; (c) Kiai have a strong influence on the santris. However, this influence is only limited to the religious field, while in terms of politics, the kiai only give political preference.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan asas demokrasi yang memiliki keunggulan dalam setiap pengambilan kebijakan karena mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat dalam sistem demokrasi sebagai tokoh utama yang memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu sarana demokrasi yang ada di Indonesia adalah dengan pemberian

## Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

## Kata kunci:

*Partisipasi politik, santri, pilpres*

## Keywords:

*Political Participation, santri, presidential election*

hak suara rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dalam sistem politik dianggap sebagai *instrument* dalam menggapai cita-cita politik bahkan nasional (Cholisin & Nasiwan, 2012).

Pemilu merupakan upaya meyakinkan dan melibatkan individu dalam proses politik. Hal ini dikarenakan ada gejala semakin berkurang gairah keterlibatan anggota masyarakat dalam pemilu (Cholisin & Nasiwan, 2012). Berkurangnya gairah masyarakat disebabkan oleh kurangnya pengaruh politik terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap salah sasaran dan tidak sesuai, hanya kalangan tertentu yang mendapat pengaruh langsung terhadap kebijakan tersebut. Maka dari itu, dalam proses pemilu masyarakat diyakinkan melalui kampanye-kampanye untuk melibatkan masyarakat dalam proses politik dan meningkatkan gairah dalam pelaksanaan pemilu.

Dua dekade pasca-reformasi, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya menuju demokrasi yang lebih baik. Salah satu tantangan tersebut adalah menguatnya politik identitas berbasis agama. Kajian Muhtadi menunjukkan bukti empiris bahwa agama menjadi bahan bakar politik identitas. Kemenangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno terhadap Basuki Thahaja Purnama – Djarot Syaeful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan bukti bahwa kinerja yang baik saja tidak cukup untuk mengantarkan pada kemenangan (Muhtadi, 2019). Identitas agama lebih mampu membuka ruang mobilisasi politik.

Dinamika mobilisasi politik berbasis identitas agama tidak terlepas dari peran lembaga keagamaan dan tokoh agama. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah pesantren atau yang lebih dikenal sebagai pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam tradisional di Indonesia (Irawan, 2018). Pondok pesantren (pesantren) adalah sistem pendidikan tradisional yang secara historis sosiologis telah kuat mengakar sebagai sub-kultur dalam bangunan budaya Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang motif utama keberadaannya adalah melestarikan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam terutama ajaran *ahlulsunnah waljama'ah*.

Pesantren memiliki beberapa elemen-elemen yang dapat berpengaruh besar, salah satunya yaitu Kiai. Dalam hubungannya, tradisi pesantren, kiai adalah elemen yang paling pokok (Dhofier, 1982). Kiai merupakan sosok yang dipandang memiliki kapasitas, kredibilitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Berdasarkan pemikiran tersebut, wajar apabila Kiai memiliki peranan dan pengaruh yang kuat, peran tersebut memberikan legitimasi baik secara sosial maupun politik untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat.

Selain kiai, dalam tradisi pesantren ada yang namanya santri yang memiliki ketaatan penuh terhadap kiai. Kehidupan di pesantren memiliki sistem budaya dan tradisi yang berbeda dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, di dalam pesantren para santri dididik dengan adanya peraturan yang mengikat. Santri pondok pesantren tradisional (*salafiyah*) cenderung asing dengan segala bentuk persoalan-persoalan yang sedang terjadi di luar, karena dalam hal ini santri *salafiyah* hanya berkecukupan dalam kegiatan keagamaan yang berada di lingkungan pesantren. Santri *salafiyah* hanya mendapatkan ilmu-ilmu agama saja tanpa dibarengi dengan ilmu umum. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat alumni yang berasal dari pesantren *salafiyah* ini muncul sebagai pemuka agama, ataupun mereka akan terjun pada sektor-sektor informal. Dalam dunia organisasi keagamaan pun alumni pondok pesantren ini hanya akan bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan yang murni keagamaan, mereka kurang tertarik dengan dunia lain di luar dari dunia mereka (Zulmi, 2012).

Santri dalam budaya pesantren, juga memiliki kebiasaan tertentu, santri memberikan penghormatan yang berlebih kepada kiainya. Kebiasaan ini bisa menjadikan sikap santri pasif karena khawatir kehilangan barokah, keyakinan yang kental bahwa seorang santri tidak boleh bersebrangan dengan

kiainya dalam semua aspek kehidupannya, dan sikap khas santri ini yang membedakan siswa-siswi di lembaga lainnya (Qomar, 2007).

Melihat hal tersebut, santri dapat dipandang sebagai massa politik yang memiliki sumberdaya potensial, karena ketaatannya dan jaringannya yang sangat luas dan banyak di seluruh Indonesia. Jaringan santri pun tidak hanya terpaku didalam pesantren, namun menyerebak luas secara umum di masyarakat dengan adanya santri kalong. Keberadaan santri ini dinilai sebagai lumbung suara yang potensial guna meningkatkan suara dalam proses pemilu dengan menggunakan santri dari kalangan pondok pesantren akan taat pada anjuran bahkan perintah dari kiainya yang secara jelas maupun simbolik khususnya saat pilpres.

Seiring perkembangan zaman, pesantren juga memiliki sisi kehidupan lain yang tak kalah pentingnya yaitu politik, oleh karena itu sebagaimana yang kita lihat selama ini bahwa dalam setiap momentum politik yang penting dalam sejarah bangsa, pesantren selalu terlibat (Ismail, 1999). Peran pesantren di masa sekarang juga amat jelas. Contoh yang paling nyata adalah sulitnya pemerintah memasyarakatkan program bila tidak melalui pemimpin pesantren. Contoh lainnya adalah banyaknya pemimpin politik mendekati pesantren, terutama menjelang pemilihan umum. Perilaku para pemimpin itu tepat, bila mereka tidak mendekati para pemimpin pesantren, berarti visi politik mereka rendah (Tafsir, 2012)

Pondok pesantren Al Luqmaniyyah merupakan salah satu pondok pesantren yang berkiblat dari NU. Pembangunan pondok pesantren atas prakarsa Bapak H. Luqman Jamal Hasibuan, seorang pengusaha kelahiran Sumatera, dan selesai akhir tahun 1999. Kemudian diresmikan pada tanggal 9 Februari 2000 oleh Simbah KH. Salimi, pengasuh Pondok Pesantren As Salimiyyah Cambahan Nogotirto Sleman DIY, dengan nama Pondok Pesantren Salaf Putra Putri Asrama Perguruan Islam (API) "Al Luqmaniyyah". Penamaan ini diambil dari nama pendiri, yaitu Bapak H. Luqman Jamal Hasibuan (Budi, 2019).

*Mahzab* dari pondok pesantren Al Luqmaniyyah pun berkiblat pada pondok pesantren API Tegalrejo Magelang yang merupakan pondok pesantren terbesar di Jawa Tengah dan merupakan salah satu pondok pesantren NU. Dilihat dari sejarahnya terdapat sebuah ikatan yang kuat antara para santri dan dengan pondok pesantren yang pernah mereka tinggali. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu pondok pesantren yang merupakan basis masa NU dijadikan sebagai lahan empuk bagi partai-partai politik, hal ini dikarenakan dalam pesantren terdapat tradisi kepatuhan pada kiai. Pengaruh kiai tidak hanya pada santri dalam pesantrennya saja, akan tetapi masyarakat sekitar pesantren bahkan bisa lebih jauh lagi. Otoritas dan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh kiai sering dimanfaatkan oleh kekuatan politik (parpol) untuk memperoleh dukungan dari santri dan masyarakat sekitarnya (Sucipto, 2006).

Pada hakikatnya dalam konteks bernegara, seorang santri adalah warga negara yang secara hukum memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dan bebas akan dirinya sendiri, namun hal tersebut tidak diindahkan dan lebih memilih untuk mengikuti petunjuk dan arahan dari kiai. Gambaran ini sangat bertolak belakang dengan hak seseorang di dalam menentukan pendapat, hal ini disebabkan karena kepatuhan santri terhadap kiainya. Seharusnya santri sebagai pemuda harapan bangsa mampu menentukan pilihannya sendiri demi tercipta suatu bangsa dan negara yang baik. Karena suara para santri menentukan keberhasilan pasangan tertentu. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tidak seharusnya terdapat politik praktis di dalamnya. Seorang santri harus memiliki wawasan politik. Namun, tidak semua pesantren ikut terlibat dalam politik praktis.

Santri berpolitik bukanlah hal yang buruk selama masih memiliki semangat mengabdikan dan menegakkan moral politik. Realitas ini membuktikan kaum santri bergerak selaras dengan gerakan

Islam yang tidak pernah padam dalam pergulatan politik untuk memperjuangkan moralitas kebenaran dengan cara merebut kuasa atas nama rakyat (Siswanto, 2018). Fenomena santri yang menyalurkan hak suaranya sesuai dengan pilihan sang kiai menjadi penting untuk diteliti, dalam hal ini adalah penyaluran hak suara untuk pemilihan presiden tahun 2019. Terutama terkait bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan para santri dan apa saja faktor yang melatarbelakangi partisipasi politik di kalangan santri.

Pengetahuan kewarganegaraan perlu ditransmisikan dengan baik kepada warga negara agar warga negara tertarik untuk melayani masyarakat (berpartisipasi secara aktif). Ketertarikan dan layanan masyarakat dipandang sebagai bahan untuk keberhasilan kehidupan demokrasi (Saltmarsh, 2005). Dengan memberikan pemahaman ini karakter santri akan semakin meningkat dan menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah Pendidikan Politik dan wawasan Kebangsaan mendapatkan urgensinya. PPKn sebagai pembentuk karakter bangsa dengan tujuan menjadikan masyarakat *good citizenship* dapat tercapai (Satori, Andrias, & Mubarak, 2017).

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terkait Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah dalam Pasangan Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin pada Pilpres Tahun 2019, dikarenakan status santri sebagai warga pesantren yang memiliki budaya patuh terhadap kiai berhadapan dengan status sebagai warga negara yang membebaskan setiap warganya dalam memilih sesuai dengan kehendak dan hati nurani masyarakat. Oleh sebab itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah dalam pilpres tahun 2019 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah. Adapun pembaruan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang merupakan santri sekaligus seorang mahasiswa sehingga menimbulkan pembaruan informasi mengenai partisipasi politik santri yang biasanya subjek penelitian merupakan *pure* santri yang hanya tinggal di dalam pondok pesantren.

## METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari perannya (Arikunto, 2010).

Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, diharapkan mampu menggambarkan secara jelas mengenai bagaimana bentuk partisipasi politik santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah dalam pilpres tahun 2019 dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah dalam pelaksanaan pilpres tahun 2019.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta (Jl. Babaran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55161). Penelitian ini dilaksanakan selama rentang waktu bulan Agustus 2020 hingga bulan Juli 2021.

### Subjek Penelitian

Dari subjek penelitian yang telah memenuhi kriteria, peneliti melaksanakan wawancara dengan subjek penelitian sebagai berikut.

1. Mohamad Fatih santri asal Cilacap
2. Mustofa santri asal Pacitan
3. Zaki Romdon santri asal Tasikmalaya

4. Ahmad Rivai santri asal Kebumen
5. M. Fadol Solikhul Anam santri asal Semarang

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara terstruktur secara langsung untuk memperoleh data dari narasumber mengenai partisipasi politik santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah. Dokumen dalam penelitian ini berupa para pengurus pondok pesantren Al Luqmaniyyah, dokumentasi kegiatan pondok pesantren Al Luqmaniyyah.

### **Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil dari dokumentasi (Bungin, 2003). Teknik *cross check* dilakukan dengan mengecek data penelitian hasil wawancara antara subyek penelitian dengan data dari dokumentasi hasil penelitian yang berkenaan dengan partisipasi politik santri Pesantren Al Luqmaniyyah.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data induktif, dalam teknik analisis ini data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Prinsip menganalisis data yaitu mengolah data menjadi informasi yang tertata, tersistematis, terstruktur, dan memiliki makna. Analisis dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah**

#### **1. Partisipasi Secara Otonom**

Para santri di pondok pesantren ini dalam berpartisipasi politik khususnya dalam pilpres tahun 2019 dilakukan atas dasar kemauan mereka sendiri. Mereka ikut berpartisipasi dalam proses pemilu atas dasar kesadaran sebagai warga negara yang baik. Kesadaran tersebut memunculkan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi melalui pemilu maupun pilpres.

Faktor kesadaran politik tersebut menjadikan para santri dalam berpartisipasi politik menjadi otonom tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan teori Huntington dan Nelson mengenai partisipasi politik secara otonom. Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian (Siregar & Ernas, 2010) yang membuat kualitas pondok pesantren menurun. Dilihat dari segi kewarganegaraan hasil ini merupakan kemajuan dikarenakan peningkatan partisipasi politik otonom sebagai bukti tingginya kesadaran politik dan Pendidikan politik santri.

Hal ini sesuai dengan teori perilaku pemilih yang menggunakan pendekatan rasional. Pendekatan tersebut dalam memberikan suara yang dianggap mendatangkan keuntungan dan kemakhslahan bersama yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemudharatan yang sekecil-kecilnya (Cholisin & Nasiwan, 2012). Tidak semua arahan yang pengasuh atau pemimpin pondok pesantren sampaikan merupakan sebuah ujaran yang wajib dilakukan karena santri juga memiliki pengetahuan mengenai dunia politik yang santri dapatkan diluar lingkungan pesantren.

Para santri di pondok pesantren Al Luqmaniyyah menganggap bahwasanya dalam berpartisipasi politik merupakan suatu bentuk kewajiban sebagai warga negara yang baik. Apa yang dilakukan oleh

santri sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Surbakti (1992) yang menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Salah satunya yaitu aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Hal ini diperkuat dengan teori (Rush & Althof, 2008) sebagai salah satu tingkatan partisipasi politik yaitu mengikuti pemungutan suara. Pengetahuan santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah cenderung tinggi karena kebanyakan dari santri merupakan seorang mahasiswa yang aktif berkegiatan di kampus. Hal ini sejalan dengan penelitian (Masruri, Sobari, & Tawwakal, 2019) yakni kiai tidak lagi menjadi sosok yang mendominasi dalam menentukan pilihan politik santri, di pondok pesantren Al Luqmaniyyah tidak pernah ada musyawarah politik secara formal.

Weber (Sastroatmodjo, 1995) mengemukakan motif yang mendasari adanya tindakan politik, antara lain motif yang rasional-bernilai, yaitu motif yang didasarkan pada penerimaan secara rasional atas nilai-nilai yang ada dalam suatu kelompok. Santri mampu memosisikan diri sebagai orang patuh kepada kiai dalam bidang agama, namun menyadari kebebasan dalam hal pilihan politik. Santri menganggap campur tangan pimpinan pondok pesantren ataupun pengasuh baik kiai tidak pernah memaksakan pilihan mereka untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Pihak pondok pesantren hanya memberi masukan dan gambaran mengenai salah satu pasangan calon tertentu namun tidak pernah memaksakan untuk memilih pasangan tersebut. Pilihan politik yang diambil dikembalikan sepenuhnya kepada para santri yang memiliki hak suara yang sah.

## 2. Partisipasi yang Dimobilisasi

Dalam proses pilpres tahun 2019 para santri di pondok pesantren ini tidak merasakan adanya bentuk intervensi ataupun perintah secara mutlak yang mengharuskan para santri mematuhi secara wajib. Para santri hanya mendapatkan sejumlah masukan, gambaran dan anjuran dalam memilih pasangan calon pemimpin yang baik dan benar serta amanah yang sesuai diajarkan oleh islam. Terkait dengan salah bentuk mobilisasi massa yaitu dengan ajakan untuk bergerak secara langsung terjun ke lapangan tidak dilakukan.

Partisipasi yang dilakukan santri Al Luqmaniyyah secara tidak langsung yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Pernyataan tersebut memperkuat teori (Huntington & Nelson, 1994) mengenai partisipasi politik otonom. Santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah bertentangan dengan hasil penelitian (Asyari, 2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran politik santri sangat rendah. Berbeda dengan santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah yang cenderung tinggi dan memiliki kesadaran dan pengetahuan politik yang tinggi.

Sebagian besar bentuk ajakan yang dilakukan menggunakan teknologi yang sekarang sedang marak digunakan masyarakat berupa aplikasi whatsapp. Bentuk ajakan untuk ikut melakukan kegiatan politik dalam masa kampanye massif dilakukan tim sukses parpol dan pasangan tertentu. Namun ajakan untuk melakukan aktivitas politik secara praktis masih dianggap tabu bagi sebagian kalangan santri.

Ajakan mobilisasi massa untuk ikut berkampanye dalam pesantren ini tidak ada, keterlibatan dari pihak pondok maupun luar untuk menggerakkan santri sebagai lumbung suara dalam pemilu pun tidak berjalan disini. Hal ini menjelaskan bahwa teori partisipasi politik di mobilisasi milik (Huntington & Nelson, 1994) tidak berjalan di pesantren ini. Semua bentuk aktivitas politik atas dasar kesadaran dan kewajiban sebagai warga negara, namun untuk ikut berkampanye secara langsung para santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah cenderung untuk diam karena menganggap aktivitas politik praktis banyak keburukan yang dihasilkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2018) bahwasanya partisipasi politik yang dilakukan atas dasar pilihan rasional dan budaya politik yang terjadi.

Peran kiai dalam memobilisasi massa sangat besar karena memiliki basis massa dari para santrinya. Namun untuk santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah lebih terfokus pada kegiatan agama daripada politik bila sudah berada di dalam pesantren. Sosok kiai yang menjadi panutan bagi para santri dijelaskan oleh Lubis (2007), yang menyatakan bahwa kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai.

Kiai memberikan kelonggaran untuk berkegiatan diluar aktivitas formal pondok pesantren yang dilakukan diluar pondok pesantren, seperti di kampus dan sekolah karena mayoritas santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah merupakan pelajar dan mahasiswa. Dari pernyataan tersebut teori mobilisasi (Huntington & Nelson, 1994) tidak berlaku di pondok pesantren ini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alwy & Febriandi, 2017) yaitu para santri cenderung partisipasi pasif dengan bentuk partisipasi konvensional dan berada pada hirarki terendah atau satu level diatas sikap apatis.

Para santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah merasa bahwasanya mereka dalam memilih pasangan calon tertentu merasa tidak ada intervensi dan memilih atas dasar kehendak mereka sendiri. Tidak ada bentuk mobilisasi yang dirasakan oleh para santri, hanya sekedar anjuran dan petunjuk dari Pak Kiai dalam memilih seorang pemimpin yang baik. Kiai melalui kelebihan pengetahuannya, terutama terhadap pemahaman agama Islam, seringkali dianggap sebagai orang yang paham akan keagungan Tuhan dan rahasia alam, oleh karenanya para kiai oleh masyarakat secara umum dianggap memiliki kedudukan yang strategis (Mastuhu, 1994).

Kesadaran para santri sebagai warga negara yang baik tercermin di pondok pesantren ini dengan kesadaran mereka yang menggunakan hak pilihnya sebagai salah satu bentuk partisipasi politik. Mobilisasi politik tidak terjadi di pondok pesantren ini karena pengetahuan politik dari para santrinya yang cukup tinggi dan didominasi oleh mahasiswa sehingga kesadaran berpolitik secara bebas sudah mereka ketahui. Hal tersebut diperkuat dengan teori (Miaz, 2012) yang menunjukkan kesadaran politik yang tinggi berakibat pada tingginya partisipasi politik. Selain itu, pernyataan tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian (Siregar & Ernas, 2010) yang membuktikan bahwa banyak pesantren mengalami penurunan kualitas karena kiai atau pimpinan pesantren lebih sibuk berpolitik. Karena para kiai fokus pada bidang agama sehingga para santri tidak merasakan dimobilisasi sehingga yang terjadi adalah sebuah partisipasi politik yang berdasarkan atas kemauan mereka sendiri. Pihak pondok pesantren hanya memberikan pandangan mengenai mana yang baik dan mana yang tidak baik.

### **3. Partisipasi Politik Konvensional dan Non Konvensional**

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Al-Luqmaniyyah merupakan pemberian suara secara langsung. Bentuk partisipasi ini merupakan salah satu yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff (2008) berada pada tingkatan delapan yaitu partisipasi dalam pemungutan suara. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alwy & Febriandi, 2017) yang menjelaskan santri berada pada hirarki terendah atau satu level diatas sikap apatis (golput), karena santri hanya menggunakan hak politiknya yang terbatas pada pemberian suara. Bentuk partisipasi ini merupakan yang terendah dari teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff.

Para santri hanya mengetahui masalah partisipasi politik sebatas pemberian suara. Santri di pondok pesantren ini cenderung hanya menggunakan hak suaranya saja dalam melakukan kegiatan politiknya. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi pasif (Rahman, 2007) yang menyebutkan bahwa partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Selain hal

tersebut, pernyataan tersebut sesuai dengan teori (Rush & Althof, 2008) yang menyatakan bahwa pemberian suara merupakan salah satu bentuk partisipasi politik paling bawah. Teori tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan (Alwy & Febriandi, 2017) bahwasanya santri melakukan partisipasi politik sebatas pemberian suara.

Pemberian hak suara tersebut sebagai bentuk cerminan menjadi warga negara yang baik dan sadar dengan hak politiknya. Tindakan tersebut dilakukan sebagai wujud cinta tanah air dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Bentuk partisipasi ini merupakan partisipasi yang pasif karena hanya berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah menurut Surbakti (2007).

Selain pemberian suara secara langsung, bentuk partisipasi politik secara konvensional berupa diskusi politik. Diskusi yang dilakukan oleh para santri merupakan diskusi keseharian yang ringan membahas berbagai isu persoalan yang aktual seperti saat pilpres tahun 2019 banyak santri yang membahas mengenai siapa yang akan menang, siapa yang akan dipilih, dan kelebihan dari masing-masing calon pasangan. Bentuk partisipasi ini menurut Roth dan Wilson (Suryadi, 2007) merupakan salah satu bentuk partisipasi yang dikategorikan berdasarkan dari intensitasnya dan bentuk dari diskusi politik ringan yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah yaitu termasuk kedalam pengamat sebagai intensitas terendah.

Bentuk diskusi tersebut dilakukan atas dasar pengetahuan dan kesadaran yang ada pada diri santri yang saling menukarkan pendapat dan informasi. Diskusi tersebut seringkali dilakukan saat waktu senggang tiba, yaitu saat selesai mengaji malam hari dan diluar jam kegiatan pondok pesantren. Kegiatan tersebut dilakukan diberbagai tempat sekitaran lingkungan pondok pesantren seperti masjid dan di ruang kamar asrama.

Para santri paling dominan untuk menjalankan bentuk partisipasinya sebatas dengan cara pemberian suara, untuk bentuk partisipasi konvensional yang lain tidak banyak yang dilakukan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alwy & Febriandi, 2017) yang menyatakan bahwa bentuk partisipasi santri konvensional dan berada pada hirarki terendah atau satu level diatas sikap apatis. Para santri di pondok pesantren ini kebanyakan hanya fokus mempelajari ilmu agama dan berkuliah. Terkait dengan keterlibatan para santri di dunia perpolitikan secara aktif sangat rendah karena keterbatasan waktu dan mobilisasi yang terbatas. Peraturan pondok pesantren ikut andil dalam minimnya para santri ikut dalam kegiatan publik diluar pondok pesantren.

Santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah lebih dominan berpartisipasi secara otonom karena atas dasar kemauan mereka sendiri. Pihak pondok pesantren tidak pernah melakukan mobilisasi atau perintah untuk memilih salah satu calon tertentu sehingga membuat para santri bebas menentukan pilihan sesuai dengan yang mereka inginkan. Para santri tidak pernah merasa dimobilisasi karena peran pondok pesantren dan para pengajar di pondok seperti Pak Kiai yang sebatas memberi gambaran, masukan dan saran-saran yang baik, mengenai penentuan pilihan diberikan sepenuhnya kepada para santri untuk memilih secara bebas tanpa intervensi dari pihak manapun.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri**

### **1. Pengetahuan dan Pendidikan Politik Santri**

Pendidikan politik yang terjadi di dalam pondok pesantren Al Luqmaniyyah tidak secara formal diajarkan karena fokus pondok yang hanya mengajarkan ilmu agama saja. Namun dengan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan pendidikan politik tetap berjalan di kalangan santri karena banyak diantara mereka yang menempuh Pendidikan formal seperti perkuliahan. Pendidikan politik yang diajarkan di pondok hanya sebatas wejangan dan nasehat dari sang kiai untuk menggunakan hak dalam berpolitik secara baik dan benar. Nasehat tersebut tidak berupa penjelasan mengenai politik itu apa dan bagaimana, namun lebih menekankan pada bagaimana menjalankan politik secara

benar dan baik sehingga para santri dalam menjalankan hak politiknya sesuai dengan hati Nurani dan pertimbangan akal yang rasional.

Pihak pondok pesantren konsisten untuk tidak ikut campur dalam dunia politik dan lebih memberikan kebebasan pada santrinya untuk melakukan aktivitas politik. Pondok pesantren fokus sebagai lembaga penyiaran agama dan masjid pondok pesantren berfungsi sebagai masjid umum yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi masyarakat umum. Masjid pesantren sering digunakan untuk menyelenggarakan majlis taklim, diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya oleh masyarakat umum (Mastuhu, 1992).

Bagi santri yang menempuh pendidikan formal mereka mendapatkan banyak pengetahuan mengenai politik ketika di luar pesantren, pengetahuan politik mereka dapatkan ketika berada dalam pendidikan formal seperti di bangku sekolah ataupun berada di kampus dan dari lingkungan pergaulannya, akan tetapi pengetahuan yang mereka dapatkan tidak begitu mendalam mengenai politik hanya sebatas tahu saja dasar-dasar mengenai politik.

Pendidikan politik perlu diajarkan kepada santri untuk menjadikan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik tersebut, selain itu dengan adanya pendidikan politik setiap individu akan lebih jauh dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran untuk mengemban tanggungjawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kesadaran berpartisipasi dalam dunia politik. Seperti yang disampaikan oleh Surbakti (1992) ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa tinggi rendah faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Dalam hal ini santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah kebanyakan merupakan mahasiswa sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran dan pengetahuan politik yaitu Pendidikan. Kesadaran santri dalam berpartisipasi politik hanya sebatas di dalam pemilihan umum saja, kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai politik menjadikan santri di pesantren Al Luqmaniyyah memahami politik hanya sebatas lingkup sempit saja.

Bagi sebagian santri yang mempunyai pengetahuan mengenai politik mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pilihan politiknya, bagi mereka dalam memilih pasangan calon tertentu tidak semata-mata hanya dari rujukan figur-figur atau tokoh yang dianggap disegani oleh masyarakat, namun perlu dilihat juga dari segi kualitas pasangan calon, santri harus tahu pemimpin seperti apa yang akan mereka pilih apakah pemimpin yang betul-betul memiliki kualitas dan kompetensi dibidangnya, serta *track record* yang jelas.

Seperti yang dikemukakan oleh menurut Myron Weimer (Mas'ood & McAndrew, 2011) partisipasi politik dipengaruhi oleh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara yang lebih rasional. Kaum intelektual ikut mempengaruhi pemikiran santri yang sebagian besar santri di pondok pesantren Al Luqmaniyyah merupakan mahasiswa sehingga pola pikir dan daya nalar lebih berkembang ketimbang para santri di pondok pesantren tradisional.

## **2. Pengaruh Kiai terhadap Pilihan Politik Santri**

Proses transisi orientasi pondok pesantren yang sebelumnya sebatas sebagai lembaga keagamaan berubah kearah politik menimbulkan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Pro dan kontra ini seringkali menjadi bahan perdebatan di masyarakat khususnya yang pro menganggap pondok pesantren harus mengikuti zaman dan tidak terpaku dalam kegiatan keagamaan namun harus mencakup ke seluruh lapisan kehidupan khususnya politik, karena dengan berpolitik eksistensi

pondok pesantren di masyarakat semakin kuat dan semakin dikenal. Menurut Falah (1999), bahwa keterlibatan pesantren dalam dunia politik justru sebuah keharusan agar eksistensi pesantren dalam masyarakat lebih terasakan lagi.

Dalam perspektif pemerintah, otoritas kiai cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan sosial dan politik masyarakat termasuk terhadap pilihan politik santri. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chalik, 2010) bahwa kiai memiliki pengaruh dalam bidang politik secara lokal, dan tidak dapat diterapkan dalam konteks kiai NU secara nasional. Kedudukan dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kiai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti *ikhlas*, *tawadhu*, dan orientasi kepada kehidupan *ukhrowi* untuk mencapai *riyadhah* (Djamas, 2008).

Para santri merasa bahwa pesantren tidak pernah memobilisasi santri untuk ikut memilih sesuai dengan pilihan pimpinan dan para pengasuh, namun para santri lebih menggunakan hak pilihnya dengan atas pilihannya sendiri tapi bisa saja hak pilihnya lebih condong kearah pilihan atau anjuran dari kiai. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian (Pribadi, 2013) yaitu kiai mengasingkan diri dari kegiatan politik dengan menjaga jarak dengan negara. Peran kiai telah menjadi perantara budaya, ekonomi, dan politik bagi masyarakat. Bagi sebagian kiai, memanfaatkan posisi dan kepribadian adalah alat untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi dan status di masyarakat.

Pendidikan modern dan meluasnya arus informasi membuat santri di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah semakin cerdas dan kritis, sehingga mereka bisa membedakan mana perilaku kiai yang muncul dari khidmatnya terhadap santri dan mana yang muncul dari kepentingan pribadi. Para santri tampaknya telah memiliki ukuran dan parameter sendiri untuk menilai kontestasi antar calon dalam menentukan ke mana pilihan mereka harus diarahkan, karena di Pesantren hubungan antara kiai dan santri tidak serta merta harus ditaati dimana pilihan seorang kiai dalam berpolitik harus diikuti oleh para santri nya. Namun pengaruh kiai terhadap pilihan politik santri tidak dapat terlepas karena para santri tetap mempertimbangkan pilihan kiai jika memang diarahkan.

## SIMPULAN

1. Partisipasi politik santri pondok pesantren Al Luqmaniyyah cenderung pasif karena santri hanya menggunakan hak politiknya yang terbatas pada pemberian suara. Selain itu, sifat partisipasi politik santri adalah otonom dengan bentuk partisipasi konvensional karena para santri dalam menyalurkan hak politiknya dilakukan atas dasar keinginan dari diri sendiri tanpa ada perintah dari pihak pondok pesantren dan dalam melakukan aktivitas politiknya para santri menyalurkan dengan tindakan yang wajar dalam demokrasi modern.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri di pondok pesantren Al Luqmaniyyah yaitu:
  - a. Para santri secara formal tidak mendapatkan pendidikan dan pemahaman politik secara teori baik langsung maupun tidak langsung dari pihak pondok pesantren. Pihak pondok pesantren hanya memberikan pendidikan agama dan ilmu mengenai agama, untuk mendapatkan pengetahuan mengenai dunia perpolitikan para santri mendapatkannya diluar pesantren seperti di sekolah dan diperkuliahan.
  - b. Kesadaran politik para santri dalam konteks partisipasi cukup tinggi, namun hanya terbatas pada pemberian suara. Diluar hal itu, para santri tidak melakukan aktivitas lainnya. Hal ini dikarenakan aturan dari pondok pesantren yang melarang melakukan aktivitas diluar pondok selain sekolah formal dan tidak ada minat dari santri untuk ikut terjun langsung dalam aktivitas politik.

- c. Kiai memiliki pengaruh yang kuat terhadap para santri. Namun demikian, pengaruh tersebut hanya terbatas pada bidang keagamaan, sedangkan dalam hal politik, Kiai hanya memberikan preferensi politik. Untuk masalah politik pengaruh kiai tidak terlalu menonjol karena kesadaran dan pengetahuan santri yang sudah tinggi. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang para santri yang kebanyakan mahasiswa. Sikap kiai yang dilakukan di pesantren membebaskan para santri dalam menentukan pilihan politiknya dan kiai hanya berperan memberikan masukan-masukan, nasehat mana yang baik dan mana yang tidak baik.

## Referensi

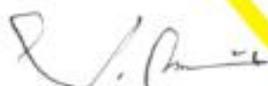
- Al Luqmaniyyah. (2020). Yogyakarta: Al Luqmaniyyah.
- Alwy, S., & Febriandi, R. (2017). Partisipasi politik santri pada pemilihan bupati aceh barat 2017. *Public Policy*, 1(1), 237-247. doi:<https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.72>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyari. (2017). Menakar kesadaran politik kaum santri dalam dinamika politik. *Fenomena*, 16(1), 99-118. doi: <http://dx.doi.org/10.35719/feno.v16i1.671>
- Batubara, F., & Asrinaldi. (2018). Peran tuan syekh dalam meningkatkan partisipasi pemilih di pesantren musthafawiyah purba baru kabupaten mandailing natal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 190-208. doi:<https://doi.org/10.15575/jispo.v8i1.3398>
- Budi. (2019, Juni 2). *Pesantren al luqmaniyyah yogyakarta*. Retrieved from laduni.id: <http://laduni.id>
- Bungin, B. (2003). *Analisa data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chalik, A. (2010). Religion and local politics: Exploring the subcultures and the political participation of east java nu elites in the post-new order era. *Journal of Indonesian Islam*, 4(1), 110-150. Retrieved from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/vi...>
- Cholisin, & Nasiwan. (2012). *Dasar-dasar ilmu politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Djamas, N. (2008). *Dinamika pendidikan islam di indonesia pasca kemerdekaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hilburn, J., & Maguth, B. (2014). Spatial citizenship education: Civic teachers instructional priorities and approaches. *The Journal of Social Studies Research*, 1(1), 1-12. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.jssr.2014.07.001i>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irawan, A. (2018). *Akar sejarah etika pesantren di nusantara: Dari era sriwijaya sampai pesantren tebu ireng dan plosa*. Tangerang Selatan: Pustaka Iman.
- Ismail, F. (1999). *Ideologi hegemoni dan otoritas agama: Wacana ketegangan kreatif islam dan pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lestari, D. A. (2018). *Budaya dan perilaku politik santri (Studi tentang partisipasi politik santri pondok pesantren daarul tauhid bandung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat 2018)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling islami kyai dan pendidikan pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press.

- Masruri, Sobari, W., & Tawwakal, G. T. (2019). Memudarnya patron-client relasi politik elektoral kiai dan santri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 75-89. doi:<https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.75-89>
- Mastuhu. (1992). *Pendidikan Islam Indonesia dalam perspektif sosiologi*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika pendidikan pesantren*. Jakarta: INIS.
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi politik pola perilaku pemilih pemilu masa orde baru dan reformasi*. Padang: UNP Press Padang.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, politik identitas dan dinamika elektoral: Mengurai jalan panjang demokrasi prosedural*. Malang: Intrans Publishing.
- Pribadi, Y. (2013). Religious networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as the core of santri culture. *Al-Jamiah*, 51(1), 1-32. doi:<https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>
- Qomar, M. (2007). *Manajemen pendidikan Islam: Strategi baru pengelolaan lembaga pendidikan Islam*. Malang: Erlangga.
- Rahman, H. I. (2007). *Sistem politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rush, M., & Althof, P. (2008). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saltmarsh, J. (2005). The civic promise of service learning. *Liberal Education*, 91(2), 50-55. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=EJ697354>
- Satori, A., Andrias, M. A., & Mubarak, H. (2017). Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan santri pondok pesantren di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 3(1), 187-192. doi:<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jps/article/view/235>
- Siregar, F. M., & Ernas, S. (2010). Dampak keterlibatan pesantren dalam politik: Studi kasus pesantren di Yogyakarta. *Kontekstualita*, 25(2), 195-224. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/37094/dampak-keterlibatan-pesantren-dalam-politik-studi-kasus-pesantren-di-yogyakarta>
- Siswanto, A. H. (2018). Moral politik santri di tengah negara kleptokrasi. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 1(1), 1-18. doi:<https://doi.org/10.35719/ijic.v1i1.43>
- Sucipto, E. (2006). *Partisipasi santri terhadap partai politik (studi tentang partisipasi santri pondok pesantren al-munawwir Krapyak terhadap partai kebangkitan bangsa di kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryadi, B. (2007). *Sosiologi politik sejarah definisi dan perkembangan konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tafsir, A. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zulmi, E. N. (2012). *Partisipasi politik santri ath-thohariyyah dalam Pilkada Provinsi Banten tahun 2011*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

JUDUL : PARTISIPASI POLITIK SANTRI PONDOK PESANTREN AL  
LUQMANIYYAH DALAM PASANGAN JOKO WIDODO DAN K.H.  
MA'RUF AMIN PADA PILPRES TAHUN 2019  
NAMA : MOHAMAD ERHAT IQBAL PASA  
NIM : 15401241042  
PRODI : PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Reviewer



Dr. Suharno, M.Si

NIP. 196804172000031001

Yogyakarta, 23 Juli 2021

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Marzuki, M.Ag.

NIP. 19660421 199203 1 001